

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi setiap insan manusia. Pendidikan bermutu bukan sekedar mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang besar di zamannya, tetapi juga diharapkan dapat membekali peserta didik untuk dapat memasuki kehidupan di alam yang kekal. Pendidikan tidak semata hanya diartikan sebagai kegiatan mentransfer ilmu, teori, fakta-fakta akademik, urusan ujian, penetapan kriteria kelulusan maupun pencetakan ijazah. Pendidikan secara esensial dimaknai sebagai proses pematangan kualitas hidup, sehingga dengan proses tersebut manusia diharapkan mampu memahami arti dan hakikat hidup, serta menjalankan tugas kehidupan secara benar. Hal tersebut yang membuat fokus pendidikan pada pembentukan kepribadian unggul dengan menitikberatkan pada proses pematangan kualitas logika, hati, dan akhlak.

Pendidikan tidak boleh menjadikan individu asing terhadap diri sendiri dan hati nuraninya. Pendidikan tidak boleh melahirkan sikap, pemikiran, perilaku semu dan menjadikan individu berada di luar dirinya. Pendidikan harus mampu menyatukan sikap, pemikiran, perilaku, hati nurani, dan keimanan menjadi satu kesatuan yang utuh. Pendidikan membantu manusia memahami cara hidup yang benar, memahami rahasia di balik kehidupan, memahami yang baik dan buruk, yang salah dan benar, maupun yang halal dan haram. pendidikan berperan untuk memahami arti, hakikat, dan tujuan hidup dengan benar.

Perkembangan pendidikan tidak terlepas dari kecenderungan globalisasi yang mempengaruhi kehidupan manusia. Pendidikan akan berkembang sesuai IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Tingkat pendidikan suatu negara akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, jika pendidikan suatu negara statis maka kualitas sumber daya manusia akan rendah serta kalah bersaing dengan negara lain.

Pemerintah mengupayakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang terpadu, merata, setara/seimbang dengan basis mutu lokal, regional, dan internasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya tidak lain guna meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia, mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan lokal serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut mendorong pemerintah mengeluarkan dan mengesahkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, yaitu UU. No. 20 Tahun 2003, menggantikan yang lama yaitu UU. No. 2 Tahun 1989. Perubahan mendasar yang dicanangkan dalam UU. No. 20 Tahun 2003 yaitu demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, jalur pendidikan serta peserta didik.

Setiap jenjang pendidikan Indonesia diwajibkan memuat mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 undang-undang tersebut.

Kurikulum pendidikan dasar wajib memuat pendidikan agama; kewarganegaraan; bahasa; matematika; ilmu pengetahuan alam; ilmu pengetahuan sosial; seni dan budaya; pendidikan jasmani dan olahraga; keterampilan/kejujuran; dan muatan lokal. Kurikulum pendidikan tinggi

memuat: pendidikan agama; pendidikan kewarganegaraan; dan bahasa (UU. No. 20 Tahun 2003 Pasal 37).

PKn merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diselenggarakan disetiap jenjang pendidikan. PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultur, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Secara lebih jelas, amanah undang-undang tersebut tercantum dalam visi dan misi PKn yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajarannya. Visi dan misi PKn dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Visi PKn yaitu menanamkan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Misi PKn ialah menghindarkan Indonesia dari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (BSNP, 2006:155).

Visi dan misi Mata Pelajaran PKn tersebut di atas, pada hakikatnya dimaksudkan untuk membentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab yang tercermin dalam perilaku dan kehidupannya berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Dasar Negara Pancasila.

Visi dan misi tersebut secara lebih jelas dijabarkan dalam tujuan PKn sebagai berikut:

1. Agar peserta didik memiliki kemampuan berfikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (BSNP, 2006:155-156).

Rumusan di atas menegaskan bahwa PKn diharapkan mampu membentuk peserta didik untuk memiliki wawasan kebangsaan, kesadaran bernegara dan optimalisasi pembentukan karakter dalam kehidupan bersama, serta sikap dan perilaku cinta tanah air yang bertanggung-jawab.

Muatan materi yang terdapat dalam kurikulum PKn diharapkan mampu menanamkan kesadaran pada setiap individu untuk tertib dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penanaman kesadaran tersebut salah satu bentuknya dapat diwujudkan melalui pendidikan politik dalam PKn. Kurikulum PKn di dalamnya memuat materi pendidikan politik, seperti penyadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Harapannya pemberian materi tersebut dapat menjadi bekal bagi siswa supaya dapat menjadi warga negara yang baik dalam berbangsa dan bernegara.

Kenyataan yang ada sekarang berbanding terbalik, sering terjadi praktik politik yang menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku. Pejabat pemerintah yang dulu di bangku sekolah sudah pernah mendapatkan pelajaran PKn dengan visi, misi, dan tujuan sebagaimana uraian di atas, dengan harapan mampu memiliki wawasan kebangsaan, kesadaran bernegara, optimalisasi pembentukan karakter, serta cinta tanah air yang bertanggung jawab. Namun, kenyataannya dalam menjalankan jabatannya sekarang sering melupakan materi-materi yang dulu telah didapatkan di bangku sekolah, materi itu seharusnya menjadi dasar

ideal dan landasan dalam melaksanakan jabatannya sekarang. Hal tersebut mungkin terjadi karena faktor ketidaktahuan, kesengajaan, maupun keterpaksaan. Faktor ketidaktahuan berarti para pejabat tidak tahu dan tidak mengerti mengenai materi PKn yang seharusnya dipahami secara mendalam, agar dapat dijalankan dalam praktik kenegaraan dengan benar serta dapat menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Faktor kesengajaan berarti para pejabat sudah mengerti dan paham mengenai materi PKn, namun dengan sengaja tidak melaksanakannya dalam kehidupan sehari-harinya. Faktor keterpaksaan diartikan sebagai suatu keadaan/sistem yang memaksa untuk melakukan penyimpangan dari hal ideal yang sesuai dengan materi PKn, padahal para pejabat sudah memahami materi tersebut akan tetapi tidak mampu untuk melawan arus sistem yang ada.

Pejabat pemerintah mempunyai amanah sebagaimana yang ada dalam visi PKn yaitu melaksanakan tugas negara, yang diharapkan mampu mengayomi dan menjamin hak asasi rakyat namun justru sebaliknya membuat rakyat semakin menderita atas tindakan yang dilakukannya. Media masa gencar memberitakan kasus pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya. Politisi dan pejabat publik banyak terjerat kasus yang menyimpang dari aturan hukum. Kasus korupsi, kolusi dan nepotisme seolah menjadi hal yang biasa dan membudaya dilakukan oleh para pejabat. Kepentingan golongan/kelompok lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan rakyat. Dalam kampanye memberikan berbagai macam janji untuk menarik simpati rakyat agar dipilih, akan tetapi setelah terpilih melupakan segala amanah yang diberikan oleh rakyat.

Sikap dan perilaku pejabat tersebut tidak sesuai dengan visi dan misi PKn dalam melaksanakan tugasnya, sekaligus menjadi salah satu faktor terjadinya krisis multidimensi, lebih dari itu penyalahgunaan jabatan tersebut mengancam integritas bangsa. Hal ini apabila berlangsung terus-menerus tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan mempercepat hancurnya bangsa Indonesia. Keadaan ini semakin diperparah jika masyarakat hanya diam, acuh, tidak peduli, dan apatis untuk melakukan monitoring dan kontroling terhadap kinerja pemerintahan.

Dampak dari perilaku pejabat yang tidak menjalankan misi dan tujuan PKn, yang pernah diperolehnya ketika sekolah dulu berakibat pada tidak dapat terpenuhinya hak-hak rakyat yang dipimpinnya secara maksimal. Masyarakat sebagai rakyat semestinya mendapatkan hak-haknya secara memadai sebagaimana tercantum dalam undang-undang. Kesejahteraan, kemakmuran, perekonomian, pendidikan, dan penghidupan yang layak bagi warga negara seharusnya menjadi prioritas utama yang menjadi perhatian pejabat pemerintah, namun justru kepentingan kelompoknya yang lebih didahulukan. Akibatnya masyarakat menjadi korban, sedangkan pejabat beserta kroni dan golongannya yang menikmati fasilitas dan kesejahteraan, bahkan kemewahan. Kebijakan yang dibuat hanya berpihak pada kepentingan golongan dan kroninya, tanpa memperdulikan kepentingan dan penderitaan rakyat. Kemiskinan menjadi fenomena yang merata hampir di semua plosok, karena pemerintah tidak mampu menghasilkan kebijakan sesuai dengan kepentingan rakyat akibat dikooptasi KKN.

Di dalam negara demokrasi, di samping kewajiban pemerintah sebagaimana yang sudah di singgung di atas, masyarakat atau rakyat juga mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan negara. Indonesia sebagai negara demokratis, maka warga negaranya harus ikut serta berperan aktif dalam penyelenggaraan negara, langsung maupun tidak langsung. Partisipasi politik seperti ini dapat menjadi sarana untuk menyeimbangkan penyelenggaraan negara, kekuasaan pemerintah terkontrol, tidak disalahgunakan. Namun, kenyataannya masyarakat apatis, irrasional, cenderung tertutup, bahkan takut dengan dunia politik. Kekecawaan masyarakat yang mendalam terhadap perilaku, sikap, dan kebijakan-kebijakan pemerintah menjadi faktor penyebabnya. Munculnya perilaku tersebut karena kelompok masyarakat lebih memfokuskan dirinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari pada memikirkan sesuatu yang dianggap tidak ada kaitannya langsung dengan kehidupan kesehariannya. Padahal kebijakan yang dibuat pemerintah akan mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Akibatnya, kontrol dan monitoring yang semestinya dilakukan oleh masyarakat terhadap pemerintah terhambat bahkan tidak jalan.

Media massa, cetak, maupun elektronik, berperan penting dalam menumbuhkan partisipasi politik masyarakat. Pemberitaan media massa semestinya menyajikan fakta dan realita, bukan sekedar opini pada pihak tertentu. Jika pemberitaan media massa objektif, maka bukan saja menjadi media informasi yang sangat bermanfaat, tetapi juga berperan sebagai alat kontrol pada pemerintah. Media massa menjadi bagian penting dalam kehidupan pemerintahan demokratis. Salah satu ciri demokrasi adalah kebebasan pers/media massa. Harapannya media massa dapat memberikan informasi secara luas bagi masyarakat. Dengan informasi yang dimiliki akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan negara.

Kenyataan di atas menegaskan bahwa pendidikan politik penting untuk diberikan dan dibudayakan pada setiap individu, khususnya pada peserta didik di sekolah. Pendidikan politik semestinya ditanamkan secara esensial bukan hanya formalitas, siswa didorong untuk memahami materi politik secara holistik dan mendalam. Sekaligus pula disajikan dengan mencakup semua ranah, baik aspek afektif maupun psikomotorik, bukan hanya aspek kognitif. Hal tersebut penting untuk menanamkan nilai-nilai dan membentuk sikap politik siswa, Nilai dan sikap politik tersebut menjadi dasar untuk menumbuhkan partisipasi politik. Rendahnya kesadaran politik warga negara akan mengakibatkan sikap apatis rakyat dalam melakukan kontrol dan monitoring atas kinerja pemerintahan. Penanaman pendidikan politik dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non formal. Secara non formal dilakukan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, sedangkan secara formal diberikan melalui kegiatan proses pembelajaran di sekolah khususnya pada mata pelajaran PKn.

Pendidikan politik untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi politik pada siswa, di samping difasilitasi oleh guru sebagai penyampai materi juga ditentukan oleh buku bacaan yang dijadikan pegangan atau bacaan. Pembelajaran PKn di sekolah merupakan salah satu bagian dari pendidikan politik. Sarana penting dalam pelaksanaan pendidikan politik adalah buku pegangan, dalam hal ini buku pelajaran PKn. Penyusunan buku pelajaran tersebut idealnya mengacu pada bahan dan sumber penting, salah satu diantaranya adalah kurikulum PKn. Dengan demikian buku tersebut diharapkan materi atau isinya terarah dan sesuai dengan usia siswa dan jenjang pendidikan, dengan demikian siswa akan lebih

mudah menerima dan mengerti tentang apa yang diajarkan serta perilaku apa yang diharapkan.

Buku ajar sebagai komponen penting dalam proses pembelajaran dan menjadi sumber belajar bagi guru maupun siswa, harus terjamin kualitasnya. Baik dari segi muatan isi materi maupun kesesuaiannya dengan kurikulum. Banyak terjadi kasus ketidaksesuaian materi buku ajar dengan kurikulum. Penelitian Rosita (2011) yang berjudul “Analisis Buku Teks Mata Pelajaran PKn Kelas II Sekolah Dasar” menyimpulkan bahwa buku teks mata pelajaran PKn kelas II SD kurang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Selain itu, Penelitian Nurdiansyah (2011) yang berjudul “Analisis Buku Ajar PKn Kelas V Sekolah Dasar” menyimpulkan materi dalam buku ajar kurang sesuai dengan kompetensi dalam kurikulum KTSP. Juga Kasus LKS kelas II SD yang menghebohkan dan dianggap tidak layak dijadikan buku ajar pegangan siswa. LKS tersebut memuat kalimat istri simpanan dalam cerita: “Bang Maman dari Kali Pasir” dalam buku Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta halaman 30-31. Hal tersebut tidak selayaknya menjadi bacaan siswa kelas 2 SD yang usianya baru menginjak 7-8 tahun (Abdullah, 2012). Selanjutnya LKS yang disusun oleh tim MGMP Provinsi Jawa Tengah bermuatan porno ditemukan pada LKS Bahasa Inggris Kelas VII yang digunakan di SMP Negeri 4 Surakarta. Muatan porno itu ditemukan pada tema ‘*Notice*’, siswa diminta untuk mendiskusikan dan menerjemahkan berbagai peringatan yang terdapat pada halaman 22. Salah satu peringatan yang dipandang dan dinilai menjurus porno, istilah: ‘*Warning Private Property Keep Out Unless You Have Really Big B***s*’ (Yustiningsih, 2012). LKS yang juga bermasalah

ditemukan di SD Muhammadiyah Plus Togaten Salatiga yang bergambar hewan babi dan daging babi dalam penjelasan bahan makanan sehari-hari. Gambar yang tidak etis tersebut berada di halaman 18 LKS Bahasa Inggris yang dibuat oleh KKG guru Bahasa Inggris. LKS ini tidak sesuai bila dijadikan buku panduan siswa di sekolah yang berhaluan Islam, karena babi adalah haram sehingga tidak mungkin untuk dijadikan bahan makanan sehari-hari. Segala makanan dengan bahan dari daging babi dilarang dalam tuntunan Islam (Susanto, 2013).

Buku ajar sebagai sumber pembelajaran di sekolah, kualitasnya tidak boleh diabaikan, karena akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pelaksanaan pembelajaran. Kualitas dalam buku ajar yang digunakan dapat dilihat dari isi, materi yang terkandung di dalam buku, dan kesesuaian materi dengan kurikulum. Kualitas buku ajar yang telah diterbitkan setidaknya dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor penulis buku, kemampuan penulis yang meliputi penguasaan materi dan kemampuan menguraikan yang dimiliki oleh seorang penulis atau pengarang buku ajar.
2. Faktor kepentingan penerbit, kondisi fisik buku, dengan tebal tipisnya buku, akan mempengaruhi biaya produksi seperti proses percetakan dan penghematan bahan-bahan, sehingga akan mempengaruhi cakupan isi materi dalam buku ajar.
3. Faktor muatan kurikulum, seharusnya dalam menyusun buku ajar harus sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah, seperti yang telah diuraikan di atas, tapi karena dipengaruhi oleh dua faktor penulis dan penerbit maka muatan buku bisa kurang sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan (Kurniawan, 2013).

Berdasarkan kasus di atas menegaskan bahwa masih ada buku ajar yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa dan kurikulum yang berlaku. Peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai muatan materi politik yang termuat dalam buku pelajaran PKn kelas XI karangan Budiyanto, apakah buku tersebut

sesuai kerangka keilmuan pendidikan politik sekaligus dengan kurikulum, silabus, standar kompetensi, dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan pemerintah. Hal itu guna mengetahui keselarasan materi yang ada di dalamnya, serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang ada. Di samping itu peneliti juga mengkaji mengenai pelaksanaan pendidikan politik pada siswa. Buku dimaksud digunakan di MAN 2 Surakarta khususnya kelas XI, serta pelaksanaan pendidikan politik baik di dalam maupun di luar kelas.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan suatu perumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana muatan materi pendidikan politik dalam buku pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan karangan Budiyanto yang digunakan di kelas XI MAN 2 Surakarta tahun ajaran 2013/2014?
2. Bagaimana pelaksanaan pendidikan politik dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di MAN 2 Surakarta Tahun Ajaran 2013/2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, sekaligus untuk memperjelas saat mengumpulkan data, dirumuskan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan muatan materi pendidikan politik dalam buku pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan karangan Budiyo yang digunakan di kelas XI MAN 2 Surakarta Tahun Ajaran 2013/2014.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan politik dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di MAN 2 Surakarta Tahun Ajaran 2013/2014.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep pendidikan politik dalam pembelajaran di sekolah, khususnya melalui mata pelajaran PKn.
 - b. Sebagai dasar untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang relevan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat bagi siswa
 - 1) Memperoleh buku PKn yang muatan isinya sesuai dengan usia, kebutuhan, dan jenjang pendidikan siswa.
 - 2) Memperoleh buku PKn yang muatan materinya sesuai dengan kurikulum serta terjamin mutu dan kualitasnya.
 - 3) Menjadikan buku PKn sebagai panduan, khususnya untuk berpartisipasi dalam kehidupan beregara.
 - 4) Mendorong tumbuhnya partisipasi siswa dalam aktifitas politik terkait mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

b. Manfaat bagi guru

- 1) Memilih buku PKn yang sesuai dengan usia siswa, jenjang pendidikan, kurikulum, silabus, standar kompetensi, dan kompetensi dasar.
- 2) Memilih buku yang sesuai dengan kebutuhan siswa.
- 3) Memilih buku yang terjamin mutu dan kualitasnya baik dari segi isi maupun muatan materinya, bukan pertimbangan yang lain.
- 4) Menjadikan buku PKn sebagai panduan dalam melaksanakan pendidikan politik kepada siswa.

c. Manfaat bagi sekolah

- 1) Memilih buku secara selektif yang muatan materinya sesuai dengan kurikulum, standar kompetensi, kompetensi dasar serta terjamin mutu dan kualitasnya.
- 2) Memonitoring dan mengawasi pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh guru kepada siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas dalam lingkup sekolah.

E. Daftar Istilah

Daftar istilah merupakan suatu penjelasan istilah yang diambil dari kata-kata kunci dalam judul penelitian (Maryadi dkk., 2010:11). Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Muatan Materi. Muatan adalah “Barang yang diangkut dengan kendaraan, atau isi (kapal dan sebagainya), disebut pula jumlah listrik positif atau jumlah listrik negatif yang ada dalam benda” (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan

Nasional, 2008:931). Jadi, muatan adalah isi atau barang yang ada dalam sebuah benda. Sedangkan materi dalam pembelajaran secara garis besar adalah “pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus diajarkan oleh guru, dan dipelajari siswa” (Depdiknas, 2003:2). Sedangkan materi merupakan “segala sesuatu yang hendak dipelajari dan dikuasai siswa, baik berupa pengetahuan, keterampilan maupun sikap melalui kegiatan pembelajaran agar dapat menjadi kompeten” (Nasar, 2006:19). Dengan demikian materi adalah segala sesuatu yang diajarkan oleh guru dan hendak dipelajari dan dikuasai oleh siswa, baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sebagai bahan untuk diujikan, dipikirkan, dibicarakan, dan dilatih melalui kegiatan pembelajaran. Sehingga yang dimaksud dengan muatan materi adalah isi yang terkandung dalam buku yang hendak dipelajari dan dikuasai oleh siswa, baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.

2. Pendidikan adalah “proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik” (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008:326). Disebut pula: “usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental” (Habulah, 2001:1). Berdasarkan kutipan tersebut maka pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh seorang individu agar menjadi lebih dewasa untuk mencapai penghidupan yang lebih tinggi. Usaha mendewasakan manusia dilakukan melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

3. Pendidikan Politik

Pendidikan politik adalah “proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara” (Permen. No. 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik). Pendidikan politik adalah “sebagai suatu cara untuk mempertahankan keadaan yang tetap stabil pada suatu saat tertentu, serta diharapkan dapat memberikan dasar bagi proses demokrasi yang lebih lanjut” (Brownhill dan Smart, 1989:9).

Pendidikan politik disebut pula sebagai upaya pendidikan yang sistematis, berkesinambungan dan menyeluruh bagi setiap warganegara dalam rangka membentuk warganegara yang baik (*good citizen*) yaitu warganegara yang sadar politik (*political literacy*), memiliki kesadaran politik (*political awareness*), dan berpartisipasi dalam kehidupan politik (*political participation*) secara cerdas dan bertanggung jawab (Yuliarto dan Winarno, 2012). Jadi yang dimaksud dengan pendidikan politik adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan secara sadar di lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakat tentang proses pembelajaran dan pemahaman hak, kewajiban, serta tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan dapat memberikan dasar bagi proses demokrasi yang lebih lanjut.

4. Pelaksanaan Pendidikan Politik

Pelaksanaan fasilitasi pendidikan politik dilakukan sebagai berikut:

- a. Kelompok sasaran fasilitasi dapat melakukan konsultasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri.
- b. Konsultasi dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis.
- c. Konsultasi cara lisan dapat dilakukan melalui tatap muka dan/atau sarana telekomunikasi.
- d. Konsultasi cara tertulis dilakukan melalui pengiriman surat dan/atau sarana komunikasi lainnya.
- e. Kelompok sasaran fasilitasi dapat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
- f. Koordinasi dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis.

- g. Koordinasi secara lisan dapat dilakukan melalui tatap muka dan/atau sarana telekomunikasi.
- h. Koordinasi secara tertulis dilakukan melalui pengiriman surat dan/atau sarana komunikasi lainnya.
- i. Kelompok sasaran fasilitasi dapat menerima fasilitas penyediaan sarana dan prasarana yang difasilitasi oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
- j. Sarana dan prasarana dapat berupa: narasumber; tempat; dan/atau sarana pendukung lainnya.
- k. Sarana dan prasarana difasilitasi sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku (UU. No. 36 tahun 2010, Pasal 8-10 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik).

Pelaksanaan pendidikan politik di sekolah dapat dilakukan secara lisan dan tertulis. Secara lisan dapat dilakukan melalui tatap muka dan/atau sarana telekomunikasi. Koordinasi secara tertulis dilakukan melalui pengiriman surat dan/atau sarana komunikasi lainnya. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pendidikan politik di MAN 2 Surakarta khususnya pada Kelas XI baik di dalam maupun di luar kelas.